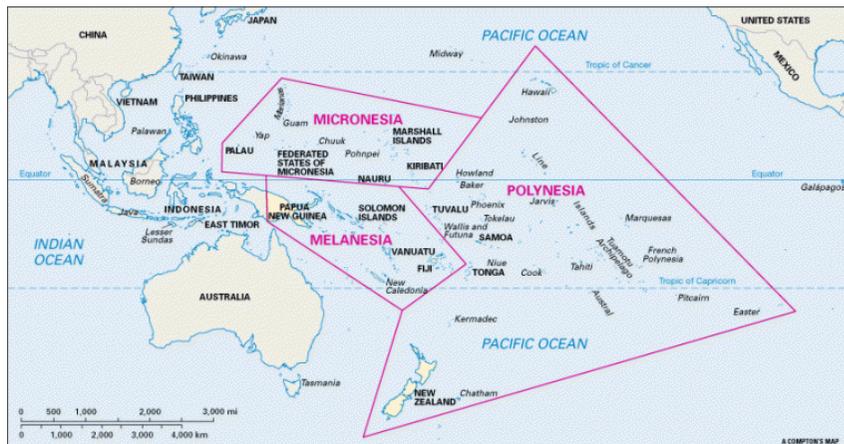


BAB III

FORUM SUB-REGIONAL PASIFIK SELATAN:

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai *Melanesian Spearhead Group*. Penulis akan menjabarkan dari terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*, tujuan, implementasi dan keperluan *Melanesian Spearhead Group* terhadap Indonesia serta kelompok pendukung yang mengatasnamakan kemerdekaan Papua yaitu *United Liberation Movement of West Papua (ULMWP)*. Pada bab ini juga penulis menyinggung mengenai keberpihakan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* terhadap kelompok separatis Papua.



Sumber: http://www.kompasiana.com/armordecosmos/kisah-mesra-melanesian-spearhead-group-dan-indonesia_5529ac03f17e615516d623cf

Wilayah Pasifik merupakan wilayah yang cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam menjaga hubungan dengan negara-negara

Pasifik adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir lingkungan politik internasional kawasan Melanesia telah mengalami perubahan yang cukup besar. Kawasan Pasifik Selatan sendiri didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Melanesia merupakan gugus kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Indonesia memiliki 3 wilayah yang memiliki rumpun Melanesia yaitu wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya semangat solidaritas etnis yang tinggi dari beberapa negara ras Melanesia, kemudian terbentuklah sebuah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

A. Selayang Pandang *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

1. Sejarah Terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*

Beberapa peristiwa penting mendahului pembentukan organisasi politik sub-regional *the Melanesian Spearhead Group*, antara lain pidato tentang sosialisme Melanesia yang disampaikan di Canberra pada tahun 1982 dan kemerdekaan Papua Nugini (1975), Solomon (1978), dan Vanuatu (1980). Pembentukan awal *Melanesian Spearhead Group* terjadi pada sebuah pertemuan informal pada tahun 1986 namun mencerminkan sebuah manifestasi penting ideologi Melanesianisme dalam politik kawasan yang telah cukup lama

berkembang.¹ *Melanesian Spearhead Group* merupakan salah satu dari tiga kelompok sub-regional di kawasan kepulauan Pasifik, yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik Barat, yang berdekatan dengan Australia, yaitu: Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS), gerakan pro-kemerdekaan dari Kaledonia Baru. Kehadiran kelompok politik seperti FLNKS bukanlah hal biasa dalam *Melanesian Spearhead Group* karena FLNKS mencerminkan akar sejarah dan politik *Melanesian Spearhead Group*, yaitu negara-negara Melanesia yang baru merdeka datang bersama-sama dalam semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen tegas untuk bekerja memastikan pembebasan saudara-saudara Kanaky mereka. Ini adalah salah satu pendorong utama dari penandatanganan '*The Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia*' pada tahun 1988.²

Melanesian Spearhead Group didirikan di Port Vila pada 14 Maret 1988 oleh kepala pemerintahan masing-masing negara Melanesia dan pemimpin FLNKS. Pada tahun 2007, *Melanesian Spearhead Group* diakui sebagai lembaga formal yang diakui dalam hukum internasional dan pada tahun 2008 *Melanesian Spearhead Group* mendirikan sekretariat di Port Vila, Vanuatu. Kelahiran *Melanesian Spearhead Group* merupakan organisasi regional terbaru di Pasifik Selatan yang telah mewarnai arsitektur baru dalam regionalisme di wilayah tersebut. Terdapat delapan organisasi regional utama di Pasifik

¹ 'MSG: trading on political capital and Melanesian solidarity', Pacific Institute of Public Policy, Briefing Paper 2(2008), 2, dalam http://www.sastrapapua.com/2016/02/melanesia-sejarah-dan-politik-sebuah_7.html diakses pada 9 Agustus 2016, pukul 14.07 WIB

² <https://bennyw10.wordpress.com/2016/07/14/apa-itu-melanesia-spearhead-group-msg-dan-apa-saja-yang-dilakukan-msg/> diakses pada 8 Agustus 2016, pukul 13.35 WIB

Selatan, yaitu *The Pacific Islands Forum (PIF)*, *the Forum Fisheries Agency (FFA)*, *the Secretariat of the Pacific Community (SPC)*, *the South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC)*, *the University of the Pacific (USP)*, *the South Pacific Tourism Organization (SPTO)*, dan *the Pacific Island Development Programme (PIDP)*. Sedangkan *Melanesian Spearhead Group* tidak pernah disebut-sebut sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan karena pada awalnya *Melanesian Spearhead Group* hanyalah organisasi informal dari sejumlah negara di sub-kawasan Melanesia yang berdiri pada tahun 1988. Pada tahun 2008, *Melanesian Spearhead Group* secara resmi diakui keberadaannya secara hukum internasional.³

Tidak seperti organisasi-organisasi regionalisme yang berkembang dikawasan-kawasan lain, sejarah regionalisme di Pasifik Selatan ditandai dengan beberapa hal. Pertama, regionalisme di kawasan tersebut diwarnai oleh nuansa identitas dan rivalitas yang kuat, bahkan mendominasi hubungan *intra* sub-kawasan, yaitu antara Melanesia, Polynesia dan Micronesia. Kedua, kerjasama regional yang dibangun tidaklah terlalu berkaitan dengan pendekatan *market-sharing* sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan negara (perdagangan bebas, kebapean, pengembangan sektor perbankan, perencanaan industri). Pendekatan yang digunakan dalam menginisiasi kerjasama lebih didorong oleh factor ketersebaran geografis, keterpencilan, ketidakberdayaan ekonomi, dan kurangnya sumber daya. Inilah yang menjadi isu keamanan fundamental di Pasifik Selatan, bukan musuh eksternal (serangan dari negara lain) dan persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah teritorial. Ketiga, kerjasama regional di Pasifik

³ Baiq L.S.W. Wardhani. *Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?*. Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. Global & Strategis, Th. 9, No.2

Selatan secara fungsional dibentuk untuk “*amplifying their voice*”. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas (ketersebaran geografis, keterpencilan, ketidakberdayaan ekonomi, dan kurangnya sumber daya), negara-negara di Pasifik Selatan hampir tidak pernah diperhatikan oleh dunia internasional. Keempat, masih berkaitan dengan faktor ketiga, bahwa regionalisme di Pasifik Selatan, di tengah perbedaan yang ada, memberikan rasa persatuan (*sense of unity*) yang berdasarkan pada keterkaitan antara tradisi, kepentingan dan sudut pandang bersama. Faktor ini menandai pentingnya dipahami ideology “*Pasific Way*” yang merefleksikan gaya konsensus non-konfrontasi dalam melaksanakan diskusi dan mencapai kesepakatan.⁴

2. Tujuan terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*

Berbagai persoalan keamanan maupun ekonomi yang berkembang menuntut adanya hubungan kerjasama antara negara dalam penyelesaiannya, sehingga negara-negara Melanesia berinisiatif membentuk organisasi subregional sebagai jawaban atas kebutuhan *collective action*. Terbentuknya organisasi sub-regional *The Melanesian Spearhead Group* tahun 1988 adalah karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tekanan eksternal dan faktor interdependensi regional. Faktor pertama, yaitu tekanan eksternal yang dimaksudkan adalah berupa tekanan dari luar kawasan regional Melanesia yang dapat terlihat melalui adanya pembentukan dan perkembangan berbagai regionalisme ekonomi di berbagai kawasan. Hal tersebut menjadi pemicu sehingga adanya keinginan yang kuat atau faktor diserable yang kemudian menyebabkan negaranegara Melanesia membentuk organisasi sub-regional ini. Adanya pasar bersama yang

⁴ Ibid

dibentuk oleh Uni Eropa tahun 1992, yang menjadikan Uni Eropa sebagai pasar tunggal yang unggul. Kemudian NAFTA dan APEC yang dibentuk dan mulai berlaku tahun 1994 yang menjadikan terbaginya blok perdagangan di dunia. Blok perdagangan di dunia seolah terpusat pada tiga kawasan besar Uni Eropa, Amerika Utara dengan adanya NAFTA, dan Asia Pasifik dengan adanya APEC. Hal ini menyebabkan negara-negara di berbagai kawasan di dunia pada umumnya dan di kawasan sub-regional Melanesia pada khususnya juga tergerak meningkatkan perekonomian regionalnya untuk dapat terlibat dalam blok perdagangan yang muncul.⁵

Faktor kedua, yaitu faktor interdependensi regional atau ketergantungan regional di antara negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dalam kawasan Melanesia. Interdependensi regional terjadi karena tingkat kerjasama ekonomi dan perdagangan intra-regional yang tidak pernah berhenti sejak terbentuknya organisasi sub-regional ini, bahkan sebelum terbentuknya organisasi sub-regional ini, hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara sudah terbentuk walaupun volume perdagangannya tidak cukup tinggi. Adanya hubungan ekonomi perdagangan yang sudah terbentuk ini menyebabkan negara-negara Melanesia berpikir untuk lebih baik jika menyatukan ekonomi dan perdagangan dalam sebuah kawasan bersama. Kemudian organisasi ini muncul, mengikuti perkembangan global dengan membentuk free trade area pada tahun 1993 dalam kawasan sub-regionalnya. Berbagi upaya peningkatan ekonomi pun

⁵ Zonggonau, Lenie Marlina. 2011.. *Pembentukan Kerjasama Sub-Regional the Melanesian Spearhead Group Tahun 1988* Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

dilakukan agar nantinya dapat menembus pasar perdagangan bebas Asia Pasifik tahun 2020 untuk negara-negara berkembang.⁶

Dikatakan sebelumnya bahwa kehadiran kelompok politik seperti FLNKS merupakan hal yang tidak biasa dalam organisasi regional yang biasanya hanya menerima negara berdaulat sebagai anggotanya. Bergabungnya kelompok etnis ini mencerminkan akar sejarah dan politik dari *Melanesian Spearhead Group* yang di dasari oleh semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen untuk membantu membebaskan sesama bangsa Melanesia yang dianggap masih berada dalam kolonialisme. Solidaritas ini menandai pentingnya, bahkan menjadi motivasi utama penandatanganan ‘Prinsip Persetujuan Kerjasama antara negara-negara Melanesia Merdeka’ pada tahun 1988. Kehadiran *Melanesian Spearhead Group* menimbulkan pertanyaan akan tumpang tindihnya organisasi ini dengan PIF karena tiga negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (Papua Nugini, Solomon Island, dan Vanuatu) juga merupakan staf di sekretariat PIF dan beberapa organisasi regional lainnya di kawasan itu.⁷

Salah satu hal yang khas adalah faktor identitas memberi pengaruh yang penting dalam perkembangan regionalisme di Pasifik Selatan. Elemen-elemen identitasnya sepertinya seperti “*we feelings*”, persamaan sejarah dan kemiripan sistem nilai dan budaya, dapat menjadi landasan kuat bagi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan organisasi regional.⁸ Pasifik Selatan memperlihatkan keberagaman kultural yang cukup besar. Contohnya, Polinesia tidak hanya

⁶ Ibid

⁷ Baiq L.S.W. Wardhani. *Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?*. Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. Global & Strategis, Th. 9, No.2

⁸ Ibid

dipisahkan oleh masalah kultural dan perbedaan linguistic tetapi juga tingkat perkembangan yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan dalam kesempatan proses ‘westernisasi’. Orang-orang Polynesia (yang mewakili ‘*the east*’), diidentifikasi sebagai ‘*the advanced*’; sementara orang-orang Melanesia (yang mewakili ‘*the west*’) acap kali diidentifikasi sebagai ‘*the backward*’. Menariknya, Fiji, yang diklasifikasikan sebagai Melanesian, dipandang sebagai bagian dari *the east*, berdasarkan pada organisasi sosial, tingkat pendidikan, pembangunan politik dan keterkaitan sosialnya dengan Samoa dan Tonga.⁹ Seperti yang telah diketahui bahwa *Melanesian Spearhead Group* berawal dari visi perjuangan untuk dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia. Akan tetapi beberapa wilayah Melanesia masih di bawah negara lain sehingga memerlukan upaya lebih untuk membantu mereka memperoleh kemerdekaan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan keterkaitan dan identitas budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.

3. Struktur Keanggotaan *Melanesian Spearhead Group*

Penjelasan mengenai struktur dalam *Melanesian Spearhead Group* bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana hak suara negara-negara anggota memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena menganut sistem konsensus. Hal ini dapat diasosiasikan dengan bagaimana kepentingan negara anggota dan konstituennya dapat dibawa dalam sistem pengambilan kebijakan. *Melanesian Spearhead Group* beroperasi pada lima tingkatan. Dimana segala aturan sudah tercantum pada *The Agreement Establishing the*

⁹ Lawson 2012, 4-5, dalam Baiq L.S.W. Wardhani. *Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?*. Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. Global & Strategis, Th. 9, No.2

Melanesian Spearhead Group (The Melanesian constitution) pasal 8-17 yang ditandatangani oleh kelima anggota pada tahun 2007. Pengambilan keputusan utama dilakukan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (*Leaders' Summit*) yang diadakan tiap dua tahun sekali dan secara bergilir dilakukan di negara anggota yang sedang memegang kepemimpinan. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh kepala pemerintahan atau wakil masing-masing negara anggota, perwakilan resmi FLNKS, serta organisasi lain yang dapat diterima dalam *Melanesian Spearhead Group*. Selain itu, ketua *Melanesian Spearhead Group* dapat mengadakan sesi khusus dalam setiap pertemuan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara konsensus. Keputusan-keputusan tersebut meliputi penerimaan kebijakan umum *Melanesian Spearhead Group*, penunjukan Direktur Jenderal Sekretariat *Melanesian Spearhead Group*, pembentukan Komite Menteri jika diperlukan, dan pengesahan atau pengajuan amandemen perjanjian baik pada tingkat *Melanesian Spearhead Group* maupun dengan konstituen.

Perbedaan kriteria, sifat, dan hak-hak pengamat (*observer*) dan keanggotaan asosiasi (*associate member*) tidak terlalu terpaut jauh. Negara pengamat hanya berhak mengikuti pertemuan jika mendapat undangan dari *Melanesian Spearhead Group*. Namun, negara keanggotaan asosiasi memiliki sedikit keistimewaan yaitu berhak meminta untuk diundang. Negara dalam keanggotaan asosiasi juga memiliki kewajiban untuk memberi kontribusi tahunan atau membayar iuran sesuai dengan jumlah yang disepakati. Kewajiban memberi kontribusi tahunan ini menyerupai kewajiban negara anggota. Dari perbedaan ini tampak bahwa Indonesia dapat memainkan hak dan kewajibannya seiring dengan perubahan status keanggotaan dalam

Melanesian Spearhead Group. Indonesia memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan posisi ULMWP sebagai negara pengamat.¹⁰

Pertemuan pada tingkat ke-2 merupakan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers' Meeting*). Pertemuan yang diadakan tiap tahun ini bertanggung jawab pada penentuan kebijakan umum serta persetujuan anggaran tahunan *Melanesian Spearhead Group*. Selain itu, pertemuan ini juga berfungsi sebagai pendorong proposal amandemen setiap aturan dan prosedur administratif, serta konstituen. Amandemen hanya boleh diajukan oleh negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*. Keputusan juga diambil melalui konsensus tetapi pada antar sesi pemimpin mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan atas nama anggota terhadap kebijakan mendesak setelah berkonsultasi dengan anggota *Melanesian Spearhead Group*. Segala hal yang dilakukan pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri akan dilaporkan pada Konferensi Tingkat Tinggi.

Selanjutnya, terdapat Pertemuan Pejabat Senior (*Senior Officials' Meeting*). Pertemuan ini juga diadakan tahunan bersamaan dengan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri atau ketika diminta oleh pemimpin *Melanesian Spearhead Group*. Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk memberikan arahan kebijakan pada Sekretariat *Melanesian Spearhead Group*, membuat laporan, serta rekomendasi kebijakan pada para pemimpin. Laporan dari pertemuan ini disampaikan pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri. Kemudian adalah Pertemuan Pejabat Perdagangan dan Ekonomi (*Trade and Economic Officials' Meeting*). Pertemuan ini dapat diadakan bersamaan dengan pertemuan lain atau secara khusus sesuai dengan

¹⁰ Wawancara dengan narasumber bernama rezha Fernando Wanggai, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 29 September 2016

permintaan. Pertemuan ini berperan sebagai pemberian saran teknis dan bantuan pada pelaksanaan atau revisi perjanjian perdagangan *Melanesian Spearhead Group*. Laporan pertemuan ini diberikan pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior. Misi khusus penanganan sengketa mungkin didirikan oleh pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi untuk merekonsiliasi konflik yang mungkin terjadi antar anggota *Melanesian Spearhead Group* maupun Anggota *Melanesian Spearhead Group* dengan pihak lain. Pertemuan tingkat menteri dan subkomite lain juga mungkin dilakukan sebagai tingkat lain.

Pasca penandatanganan *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* tahun 2007, Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* didirikan di Vila dan dibuka pada tahun 2008. Pendirian Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* dan gaji direktur jenderal selama tiga tahun awal pembentukan ini mendapat bantuan dana dari Pemerintahan Cina, Uni Eropa juga menyediakan dana untuk badan ini.¹¹ Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* dikepalai oleh seorang direktur jenderal yang bertugas selama tiga tahun dan dipilih pada Konferensi Tingkat Tinggi. Badan ini bertanggungjawab pada administrasi dan manajemen urusan *Melanesian Spearhead Group*, pemberi saran kebijakan, serta koordinasi dan bantuan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan oleh konstituen *Melanesian Spearhead Group*.

Pada penjabaran di atas tampak bahwa terdapat ketergantungan pada kekuatan-kekuatan besar lain yang masih memiliki kepentingan di rezim kerjasama sub-regional ini. *Melanesian Spearhead Group* seolah harus mengesampingkan cita-cita awalnya untuk melepaskan diri dari

¹¹ May, Ronald, *The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity*, Australian Strategic Policy Institute, 8 Februari 2011, Hal. 3

bayang-bayang kekuatan negara besar seperti Australia dan Selandia Baru pada rezim kerjasama sebelumnya, PIF. *Melanesian Spearhead Group* masih membutuhkan sokongan ekonomi dari kekuatan-kekuatan besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat ekonomi dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara-negara di kawasan ini. Dapat dikatakan bahwa ekonomi menjadi salah satu jalan untuk membuka kerjasama dengan kawasan ini. Hal inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencapai kepentingannya. Selain itu, Indonesia juga perlu menjalin kedekatan dengan negara anggota untuk dapat mendukung kepentingan Indonesia dengan menggunakan hak suara.

4. *Front de Liberation National Kanak et Socialiste (FLNKS) dan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG)*

Regionalisme di kawasan Pasifik Selatan diwarnai oleh nuansa identitas dan rivalitas yang kuat. Hal ini mendominasi hubungan intra sub-kawasan, yaitu antara Melanesia, Polinesia, dan Micronesia. Keanggotaan organisasi regional yang tidak membedakan status kemerdekaan menunjukkan ciri non-formal dan relatif egalitarian dalam diplomasi negara-negara di kawasan ini.¹² Hal ini juga tampak pada keanggotaan FLNKS dalam *Melanesia Spearhead Group*. Dalam *The Agreed Principle of Co-operation amongst Independent States of Melanesia* tahun 1988 dan *The Agreed Principles for Cooperation* tahun 2007, *Melanesia Spearhead Group* menunjukkan komitmen yang besar terhadap usaha kemerdekaan seluruh warga Melanesia. Hal

¹² Wardhani, Baiq L.S.W., '*Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?*', hal. 191

tersebut berkaitan dengan tanggung jawab *Melanesian Spearhead Group* terhadap implementasi *Noumea Accords*. Pada 5 Mei 1998, FLNKS, RCPR sebagai kelompok anti kemerdekaan, dan Pemerintah Perancis menandatangani *Noumea Accords*. Hal ini menyepakati adanya masa transisi selama 15 tahun, peningkatan kewenangan, dan referendum kemerdekaan yang akan dilakukan setelah tahun 2014. Terkait usaha tersebut, Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* mendirikan badan tersendiri yang berfokus pada perkembangan kemerdekaan Kanak pada tahun 2012. Sekretariat juga memfasilitasi kunjungan belajar para pemuda dan profesional Kanak ke Timor Leste dalam rangka pembelajaran *state-building* yang dapat diaplikasikan pasca merdeka.¹³

Pengakuan dan dukungan *Melanesian Spearhead Group* tidak hanya diwujudkan dengan keanggotaan FLNKS yang pernah mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin *Melanesia Spearhead Group* pada Juni 2013 hingga kedudukan itu dipegang oleh *Solomon Island* pada 2015. Hal ini lah yang kemudian menjadi faktor pendorong *United Liberal Movement of West Papua* (ULMWP) untuk menggalang dukungan dalam *Melanesia Spearhead Group*. Kelompok ini sebelumnya dikenal dengan Aliansi Papua atau *West Papuan National Coalition for Liberation* (WPNCL) dan telah mengajukan keanggotaan *Melanesian Spearhead Group* pada *Leaders' Summit* Juni 2013 di Noumea. Seluruh anggota *Melanesian Spearhead Group* mendukung upaya pengajuan keanggotaan ini. Negara-negara di

¹³ Forau, P. and T. Newton Cain, 2014, 'Peter Forau on Why the Melanesian Spearhead Group is a Success', *Devpolicy* (daring), 5 Maret, <devpolicy.org/peterforau-on-why-the-melanesian-spearhead-group-is-a-success-20130305/> , diakses 14 Agustus 2016

kawasan Pasifik menyebut Papua Barat sebagai ‘*country in waiting*’ sejak tahun 1963, satu tahun pasca wilayah ini menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Oleh karenanya, perlawanan untuk memerdekakan diri dari NKRI masih terus diperjuangkan..

United Liberal Movement of West Papua (ULMWP) merupakan gabungan dari tiga kelompok Organisasi Papua Merdeka yang sebelumnya memperjuangkan kemerdekaannya secara terpisah . Kelompok ini merupakan kelompok pro kemerdekaan dari Indonesia yang terbentuk pada Desember 2014 di Vanuatu. Ketiga kelompok itu adalah *Federal Republic of West Papua* (NRFPB), *National Coalition for Liberation* (WPNCL), dan *National Parliament of West Papua* (NPWP). Pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh Pemerintah Vanuatu, *The Malvatuamuri Council of Chiefs*, *The Vanuatu Christian Council of Churches*, dan *The Pacific Council of Churches*. Beberapa tokoh penting dalam kelompok ULMWP seperti Octavianus Mote yang menduduki jabatan sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda, Rex Rumakiek, Leone Tangahma, dan Jacob Rumbiak sebagai juru bicara. Benny Wenda merupakan pendiri *Free West Papua Campaign* (FWPC) yang didirikan di Oxford, Inggris pada tahun 2004. FWPC sendiri mendapat dukungan dari sebagian politisi di Inggris. Hal ini juga dikenal dengan *International Parliaments of West Papua*. Sebagai tokoh yang paling berpengaruh, Benny Wenda berperan aktif dalam upaya penggalangan dukungan internasional terhadap ULMWP.

Adapun tujuan pembentukan ULMWP adalah untuk mendapat keanggotaan dalam *Melanesian Spearhead Group* serta memperjuangkan hak-hak untuk menentukan nasib sendiri, ekonomi, dan keadilan sosial. ULMWP ingin menunjukkan eksistensi mereka

untuk mengimbangi klaim Indonesia bahwa gerakan Papua Merdeka merupakan gerakan yang tidak resmi, terpecah belah, dan tidak merepresentasikan keinginan warga Papua Barat. Dengan menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group*, ULMWP dapat memanfaatkan *Melanesian Spearhead Group* sebagai forum untuk menekan Indonesia atas kebijakan dan perlakuannya terhadap Papua Barat. ULMWP mengklaim bahwa Indonesia telah memberikan tekanan politik dan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta merampas hak pengelolaan wilayah Papua. Kurangnya pelayanan pendidikan dan juga kesehatan merupakan salah satu hal yang mendukung ULMWP untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Aliansi Papua belum mendapat kepastian keanggotaan sejak mengajukan keanggotaan di tahun 2013. Terkait isu pelanggaran HAM, Indonesia meminta *Melanesian Spearhead Group* untuk melakukan observasi lapangan untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM di wilayah tersebut sebelum memutuskan menerima ULMWP. Investigasi yang dikenal dengan *Foreign Ministerial Mission* (FMM) dilaksanakan pada 11-16 Januari 2014 dan tidak berhasil menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi ini malah berakhir dengan penandatanganan *statement committing* antara Delegasi *Melanesian Spearhead Group* dan Pemerintahan Indonesia untuk menghormati kedaulatan, kesatuan dan integritas teritori dan tidak menginterferensi urusan dalam negeri masing-masing. Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group* juga menjanjikan kerjasama dalam bidang ketahanan

pangan, perdagangan, pendidikan, pengambilan kebijakan, dan pertukaran budaya.¹⁴

Pada 26 Juni 2014, *Melanesian Spearhead Group* mengadakan *Special Leader Summit* di Port Moresby, yang bertujuan untuk mempertemukan perwakilan pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia. Perwakilan pro kemerdekaan adalah Jacob Rumbiak, aktifis yang berbasis di Australia. Sedangkan Franz Albert Joku dan Nick Messet mewakili pihak pro-Indonesia. Pada pertemuan itu, pemimpin menyarankan adanya kerjasama bilateral antara Pemerintahan Indonesia dan ULMWP untuk memiliki kesamaan suara mewakili masyarakat Papua Barat. Hal ini juga dapat dijadikan jalan dalam hal pengajuan keanggotaan keduanya di *Melanesian Spearhead Group*. Saat itu *Melanesian Spearhead Group* seolah berkata pada pihak ULMWP untuk memertimbangkan lagi pengajuan keanggotaannya. Saat itu ULMWP dan Indonesia masih diterima sebagai anggota pengamat. ULMWP dianggap sebagai wakil penduduk Indonesia di luar negeri. Pemimpin *Melanesian Spearhead Group* berjanji pada ULMWP untuk terus mengadakan dialog dan kerjasama dengan Indonesia terkait pemenuhan dan penjaminan penegakan hak asasi manusia di wilayah Papua Barat.

B. Indonesia dan Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

¹⁴ Arto Suryodipuro, "Building Relations with Pacific Islands Countries," *The Jakarta Post* (daring), 25 January 2014, <<http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/building-relations-with-pacific-island-countries.html>>, diakses 28 Agustus 2016

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terletak diantara tiga benua besar, yaitu Asia di bagian barat, Amerika di bagian timur, dan Australia di belahan selatan. Wilayahnya membentang sekitar 16.00 km dari Guam di bagian barat sampai ke Pitcairn di bagian timur dan membujur sekitar 15.000 km dari selat bering di Utara sampai ke *Antartic Circle* di bagian selatan.¹⁵ Pasifik Selatan merupakan kawasan yang dengan luas daratan hanya sekitar 552.000 km², dengan rasio 54 lautan berbanding 1 dengan daratan. Secara geografis merupakan kawasan pasifik selatan meliputi luas sekitar 30 juta kilometer persegi di sebelah selatan samudera Pasifik. Oleh karena itulah kawasan pasifik selatan dapat disebut sebagai “Benua Air” (*Aquatic Continent*).¹⁶ Pasifik Selatan pada awalnya dihuni oleh imigran-imigran dari Asia Tenggara dan Asia lainnya kemudian dikenal sebagai suku bangsa Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Melanesia, dari gugusan pulau di sebelah utara dan timur laut Australia, yaitu Papua Nugini, *Solomon Islands*, Vanuatu, Fiji, dan *New Caledonia*. Ciri fisiknya yaitu berkulit gelap. Mikronesia terdiri dari 8 negara, yakni Micronesia, Guam, Kiribati, *Marshall Islands*, Nauru, *Northern Mariana islands*, Palau, dan *Wake Islands*. Ciri fisiknya adalah berkulit hitam, dan memiliki rambut keriting.¹⁷

Polinesia terdiri dari gugusan pulau ditengah dan selatan samudera hindia seperti Hawaii, *New Zealand*, *Easter Island*. Ciri fisiknya yakni bertubuh tinggi kekar, tegap, kulit agak cerah dan rambut lurus. Melanesia, merupakan etnis yang secara demografi

¹⁵ Hamid, Zulkifli. (1996). *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Hery Saripuddin,dkk. *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia Dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: P3K2 Aspasaf.

banyak berada di pasifik selatan. Negara- negara seperti Fiji, Papua Nugini, Vanuato, Solomon *Islands*, Timor Leste, Samoa, dan Kaledonia Baru merupakan negara-negara yang banyak dihuni oleh ras melanesia.¹⁸ Kawasan Pasifik Selatan memiliki wilayah lautan yang meliputi 1/3 dari wilayah laut dunia. Terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya terpisah satu sama lain dengan jarak yang berjauhan. Kondisi fisik Pasifik Selatan sangat didominasi oleh lautan. Keadaan pulau-pulaunya juga sangat rawan terhadap gejala-gejala ala, baik karena posisinya yang terbuka oleh arus angin dari berbagai arah, abrasi air laut yang menerpa pantai-pantainya, maupun gempa bumi. Dengan demikian, lingkungan di kawasan Pasifik Selatan menjadi sangat berbahaya apabila dijadikan untuk ujicoba senjata nuklir. Demikian pula bila lautannya dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah nuklir dan senjata konvensional, karena akan membahayakan bagi kelangsungan hidup sumber daya alam dan manusia.¹⁹

Luas daratan masing-masing negara dan wilayah berbeda. Terdapat negara atau wilayah yang memiliki lahan yang sangat luas. Sumber daya alam yang melimpah seperti laut, dan mineral menjadi potensi yang besar bagi kawasan ini. Namun, perekonomian negara-negara Pasifik Selatan pada umumnya masih terbatas. Penghasilan utama yang diandalkan adalah dari sektor-sektor perikanan, perkebunan kelapa, dan pariwisata. Meskipun beberapa negara di antaranya

¹⁸ Ibid

¹⁹ Anshari, Yumna Sani. 2016. *Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan*. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. (skripsi)

memiliki potensi bahan tambang yang besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan.²⁰

1. Indonesia - Fiji

Hubungan RI-Fiji secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kerja sama dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral. Sejak 2011, hubungan bilateral RI-Fiji menuju tingkatan baru dengan terlaksananya kunjungan PM Frank Bainimarama ke Indonesia pada 5-6 April 2011, pembukaan Kedutaan Besar Fiji di Jakarta, dan penandatanganan perjanjian *Development Cooperation Agreement* (DCA) pada 27 Mei 2011.

Terselenggaranya kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Nadi, Fiji, 17-20 Juni 2014 yang merupakan kunjungan historis pertama kali Kepala Pemerintahan Indonesia ke Fiji sekaligus bertepatan dengan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua Negara dan menjadi *Chief Guest* dalam *Pacific Islands Development Forum* (PIDF) *Second Leaders Meeting*. Menteri Luar Negeri Indonesia juga telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola dalam rangka kunjungan para Menteri Luar Negeri dan Wakil *Melanesian Spearhead Group* (MSG) ke Indonesia pada 15 Januari 2014.²¹

Terkait bergabungnya Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*, terbentuk komitmen terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI serta keputusan Fiji untuk tidak mendukung aplikasi

²⁰ Haris, Syamsuddin. 1989. *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. Jurnal Politik. Jakarta: PT Gramedia.

²¹ *Diplomasi Indonesia 2014*. Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 47.

keanggotaan *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) di *Melanesian Spearhead Group*. Surplus dalam perdagangan bilateral dengan Fiji, khususnya di sektor non-migas. Peningkatan kerja sama sosial budaya dan teknik, partisipasi pada program BSBI dan berbagai pelatihan capacity building di bidang energi mikro-hidro pedesaan budidaya dan pengolahan pasca-panen (pertanian dan perikanan), teknologi perikanan, dan penanggulangan bencana.

Pembukaan pusat pelatihan teknologi budidaya dan pengolahan rumput laut di Desa Mau dan Kerupuk Center di Desa Namotomoto Fiji. Penyerahan bantuan berupa alat mesin pertanian 10 traktor tangan pada 15 Maret 2014 (bantuan pertama tahun 2004) dan pengiriman tenaga ahli penyuluh pertanian. Terkait rencana pendirian *Melanesian Spearhead Group Regional Police Academy* (MSG RPA), pemerintah telah memberikan bantuan senilai USD 500,000 (lima ratus ribu dolar AS) bagi pembangunan prasarana gedung *Melanesian Spearhead Group Regional Police Academy* di Fiji. Bantuan secara resmi diberikan oleh Sesmenko Polhukam RI kepada PM Fiji di Suva, 8 Januari 2014. Diplomasi Indonesia di Fiji menghadapi kendala terkait kurangnya konektivitas maupun basis ekonomi kepulauan yang terbilang kecil sehingga cukup menghambat tumbuhnya minat untuk menggali peluang, familiaritas dan rasa percaya diri menuju peningkatan interaksi bisnis maupun *people-to-people contacts*.²²

Prioritas hubungan luar negeri Indonesia setelah kawasan Asia Tenggara akan merujuk di kawasan pasifik selatan. Dengan adanya berbagai kunjungan, bantuan teknis dan non teknis, sumbangan alat penunjang kegiatan ekonomi bisa dijadikan tolak ukur keseriusan

²² Ibid

Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Fiji serta negara-negara di wilayah Pasifik Selatan lainnya.

2. Indonesia - Papua Nugini

Hubungan bilateral RI-PNG hampir tidak pernah mengalami konflik terbuka yang berdampak serius bagi hubungan bilateral, meskipun terdapat kelompok pengacau keamanan Indonesia bermarkas di wilayah Papua Nugini yang sulit dijangkau. Peningkatan hubungan bilateral RI-PNG sepanjang 2013 telah memberikan bobot strategis dari hubungan dan kerja sama bilateral, khususnya dalam konteks menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan yang erat antara kedua negara.

Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler di tahun 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik setelah Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada 16 september 1975. Secara umum, hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini selama ini telah berjalan dengan baik. Indonesia menempatkan Papua Nugini sebagai negara yang penting karena mempunyai perbatasan langsung, secara darat maupun laut. Papua Nugini juga melihat Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan yang dapat membantu Papua Nugini dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia.²³

Di tahun 2013 Perdana Menteri Papua Nugini O'Neill ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan presiden Sushilo Bambang Yudhoyono. Selain penandatanganan kesepakatan

²³ Hery Saripuddin, dkk. *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia Dalam Diplomasi Indonesia. Jakarta: P3K2 Aspasaf.*

kemitraan komprehensif, kedua negara juga menandatangani 11 nota kesepahaman atau MoU. Beberapa bidang yang dilakukan kerejasama meliputi hukum ekstradisi, batas wilayah, pemuda dan olahraga, energi dan pariwisata. Dengan disepakatinya kemitraan komprehensif beserta plan of action implementasinya, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.²⁴

Beberapa kerjasama yang diutamakan antara Indonesia dan Papua Nugini meliputi pengelolaan perbatasan, penanganan kejahatan lintas-negara, pengembangan sumber energi mineral dan minyak, promosi *people-to-people contacts* dalam mengeratkan sesame etnis Melaneisa.²⁵ Berikut adalah poin-poin pertemuan dan kunjungan masing-masing kedua negara (Indonesia dan Papua Nugini):

1. Pertemuan Tingkat Kepala Negara, Kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Papua Nugini, pada tanggal 11-12 Mei 2015, Kehadiran pada pelantikan Presiden, RI dan kunjungan kehormatan PM Hon. Peter O'Neill dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, 21 oktober 2014.
2. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Marsudi Menteri Luar Negeri Papua Nugini Hon. Rimbink Pato di sela-sela AMM/ARF/EAS di Kuala Lumpur, 4 Agustus 2015.
3. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Papua Nugini di Port Moresby, 11 Mei 2015.

²⁴ Ibid. Hal 21

²⁵ Ibid. Hal 22

4. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Papua Nugini di sela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, 19 April 2015.
5. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno -Menteri Luar Negeri Papua Nugini Hon. Rimbink Pato dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Port Moresby, Papua Nugini, 27 Februari 2015.

Antara Indonesia dan Papua Nugini telah dibicarakan cara dan upaya untuk lebih meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui di tahun 2013. Hal tersebut terlihat terutama di bidang kerja sama ekonomi, pemajuan konektivitas serta hubungan antar masyarakat (*people-to-people*), peningkatan manajemen perbatasan serta penguatan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

3. Indonesia - Vanuatu

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980, namun hubungan diplomatik RI-Vanuatu baru terjalin setelah ditandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1995. Hal penting dalam hubungan Indonesia-Vanuatu adalah penandatanganan *Joint Communique on the Occasion of the Visit of the Foreign Minister of The Republic of Vanuatu to Indonesia* oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Moana Carcasses 9 Maret 2004.²⁶ Hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara semakin meningkat. Sebagaimana ditandai dengan semakin intensifnya saling kunjung pada tingkat pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara, serta dengan

²⁶ Ibid. hal 27

adanya kerangka kerjasama teknis dalam berbagai bidang. Kepentingan utama Indonesia Sebagai mitra RI dalam mewujudkan kawasan Pasifik yang bersahabat, Membangun pemahaman antar-bangsa yang lebih baik Memperluas pasar bagi produk Indonesia. Fokus hubungan RI-Vanuatu, Kemananan Indonesia (keutuhan NKRI) Perdagangan dan investasi, serta mengeratkan *People-to-people contact* (etnis Melanesia).²⁷

Hubungan kedua negara pada dasarnya telah berjalan baik dan masih berpotensi untuk terus dikembangkan mengingat berbagai isu dan tantangan bersama seperti perubahan iklim, bencana alam, energi dan pembangunan dapat ditangani dengan kerja sama erat kedua negara baik bilateral maupun regional. Namun Adanya pergantian pemerintahan di Vanuatu dari Perdana Menteri Sato Kilman ke Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil pada tanggal 21 Maret 2013 telah menyebabkan adanya pergeseran kebijakan Pemerintah Vanuatu dalam melakukan hubungan dengan Indonesia. Dalam Agenda Rencana Aksi Prioritas 100 hari Pemerintah Vanuatu di bawah Perdana Menteri Moana Carcasses yang diumumkan pada tanggal 10 April 2013, PM Carcasses telah menyampaikan rencana dukungan terhadap keanggotaan WPNCL di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan

²⁷ Haidi, dkk. *Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika.*(2016). *Background Information Perkembangan Terkini Hubungan Bilateral RIVanuatu*. Dokumen Kementerian Luar Negeri vol 3, dalam Anshari, Yumna Sani. 2016. *Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan*. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. (skripsi)

penghentian *Development Cooperation Agreement* (DCA) RI-Vanuatu yang telah ditandatangani pada 20 Desember tahun 2011 di Jakarta.²⁸

Dalam Agenda Rencana Aksi Prioritas 100 hari Pemerintah Vanuatu di bawah Perdana Menteri Moana Carcasses yang diumumkan pada tanggal 10 April 2013, PM Moana Carcasses telah menyampaikan rencana dukungan terhadap keanggotaan WPNCL di *Melanesian Spearhead Group* dan penghentian *Development Cooperation Agreement* (DCA) RI-Vanuatu. Dukungan Vanuatu terhadap keanggotaan WPNCL di MSG telah disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu pada Pertemuan Tingkat Tinggi *Melanesian Spearhead Group* di Noumea, tanggal 20-21 Juni 2013. Upaya Vanuatu tersebut berhasil digagalkan dalam MSG Leaders' Meeting di Papua Nugini pada Juni 2014. Sementara itu, belum terdapat perkembangan lanjutan terkait wacana penghentian *Development Cooperation Agreement* (DCA) RI Vanuatu oleh Pemerintahan. Menlu RI juga telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Vanuatu, H.E. Mr. Sato Kilman di Bali Democracy Forum ke-7, pada 10 Oktober 2014.²⁹

Hubungan ekonomi Indonesia–Vanuatu menjadi urgen dan strategis apabila hubungan ekonomi tersebut dilihat sebagai pintu masuk bagi Indonesia ke dalam dialog politik dengan Vanuatu. Terselenggaranya dialog politik yang positif antara Indonesia dengan Vanuatu akan mempermudah Indonesia dalam menjalin hubungan positif dengan negara lain yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea dan

²⁸ *Diplomasi Indonesia 2014*. Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 52.

²⁹ *Ibid*

Solomon Islands), sehingga selanjutnya memungkinkan dinaikkannya status keanggotaan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* dari saat ini sebagai anggota pengamat (*observatory member*) menjadi sebagai anggota penuh (*sovereign state member*).³⁰

Di antara negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, Vanuatu termasuk yang paling berpengaruh. Konsep *Melanesian Socialism and Melanesian Solidarity* sering disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu pertama yaitu Walter Hadye Lini sebagai kampanye untuk meraih dukungan sesama negara Melanesia agar membantu orang Kanak di New Caledonia, orang Timor Timur (*East Timor*) dan Papua Barat (*West Papua*) dalam berjuang meraih kemerdekaan. Ucapannya yang terkenal adalah “*Vanuatu will not be free until the entire region of Melanesia is free*”.³¹

4. Indonesia - Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon merupakan negara sahabat yang selalu menunjukkan posisi mendukung RI, termasuk dalam fora PBB, MSG, dan PIF. Selain mendukung masalah Papua sebagai masalah internal Indonesia, pada tahun 1980-an Kepulauan Solomon juga telah mendukung RI dalam penanganan terhadap masalah Timor Timur. Kepulauan Solomon mulai menunjukkan orientasi untuk menerapkan kebijakan “look north” untuk mengurangi ketergantungan dengan negara besar di Pasifik Selatan dan mendekati diri ke Asia. Namun

³⁰ Munandar, Yusuf. *Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Vanuatu*. Jakarta: pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

³¹ The Melanesian Spearhead Group. (2012). Annual Report 2012. Port Vila: MSG Secretariat. <http://www.msgsec.info/index.php/publicationsdocuments-a-downloads/annualreports?download=285%3A2012-annual-report>. Dalam Munandar, Yusuf. *Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Vanuatu*. Jakarta: pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

dengan karakter mayoritas etnis Melanesia maka mudah terpengaruh wacana *Melanesian brotherhood* (pernah mengemuka di parlemen SI masa konflik antar etnis, 2003). Tahun 2014 menunjukkan peningkatan dalam hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kepulauan Solomon dengan kunjungan Perdana Menteri Gordon Darcy Lilo ke Indonesia, 4-6 Agustus 2014.

Bagi Indonesia, kunjungan tersebut bermanfaat dalam menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan yang lebih erat dengan negara-negara kawasan Pasifik. Namun demikian, hingga saat ini belum ada perjanjian payung untuk pengembangan kerja sama di berbagai bidang atau pembentukan forum pertemuan konsultasi/koordinasi implementasi perjanjian. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga telah Melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Solomon Islands, H.E. Clay Forau Soalaoi dalam rangka kunjungan para Menteri Luar Negeri dan Wakil *Melanesian Spearhead Group* ke Indonesia pada 15 Januari 2014.³²

C. Negara-Negara Anggota *Melanesia Spearhead Group* terhadap Isu Papua Barat dan Pengajuan Keanggotaan tetap oleh ULMWP

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat telah menyita perhatian dunia. Terdapat anomali dalam *stance* negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* terhadap isu Papua Barat. Terdapat perbedaan pendapat dari anggota-anggota *Melanesian Spearhead Group* mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Isu Papua Barat yang marak diperbincangkan ini sering kali

³² *Diplomasi Indonesia 2014*. Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 47.

dijadikan ajang menggalang dukungan saat pemilu untuk menarik simpati rakyat. Mosi tidak percaya terkait isu ini juga menggulingkan beberapa pejabat politis dari posisi yang diperoleh.³³ Pemerintah Vanuatu menunjukkan dukungan yang besar terhadap upaya masuknya ULMWP ke dalam *Melanesian Spearhead Group*. Vanuatu merupakan pendukung lama kemerdekaan Papua Barat. Hal ini tidak hanya dilakukan pada level elit tetapi juga pada level akar rumput sejak kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980. Perdana Menteri Pertama Vanuatu, Father Walter Lini, pada pidatonya mengatakan bahwa Vanuatu tidak sepenuhnya merdeka jika bagian lain Melanesia, khususnya Papua Barat, masih dibawah kekuasaan asing.³⁴ Sejak awal kemerdekaan Vanuatu, Perdana Menteri Walter Lini telah menjalin kerjasama dengan beberapa kelompok radikal, bahkan mengizinkan negaranya digunakan sebagai basis bagi gerakan separatisme.³⁵

A Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) dibentuk di Port-Villa pada tahun 2008. Asosiasi ini dibentuk untuk mengadvokasi perjuangan kemerdekaan dan pemenuhan hak asasi manusia di Papua Barat. Asosiasi ini beranggotakan perwakilan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintahan, Institusi kebudayaan, *The Vanuatu Council of Church*, dan *The Vanuatu National Council of Chiefs*. Tidak hanya itu, Parlemen Vanuatu, dengan persetujuan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi, menyetujui *Watok Blong Yumi Bill* pada tahun 2010 yang berasal dari petisi rakyat untuk mendukung Papua Barat dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Hal ini digunakan untuk membentuk kebijakan spesifik terkait Papua Barat

³⁴ Elmslie, Jim, 'Indonesian Diplomatic Manuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities' dalam Azizian, Rouben (eds.), *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*, Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, 2015, hal. 99

³⁵ Wardhani, Baiq L.S.W., 'Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?', Hal. 196

dan menjadi landasan Vanuatu dalam mendukung keanggotaan ULMWP di *Melanesian Spearhead Group*. Vanuatu pernah memiliki kedekatan dengan Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Sato Kilman, dimana pada masa itu Indonesia berhasil masuk sebagai *observer* di *Melanesian Spearhead Group*. Akibat memiliki kedekatan dengan Indonesia, Sato Kilman kemudian diberhentikan pada 21 Maret 2013.

Berbeda dengan masa kepemimpinan Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil, dimana Vanuatu memberikan dukungan penuh terhadap WPNCL untuk mengajukan keanggotaan di *Melanesian Spearhead Group*. Vanuatu memfasilitasi Andy Ayamiseba dan John Otto Ondawame, selaku perwakilan dari WPNCL, untuk melakukan lobi dengan Pemerintah Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Perdana Menteri Kalosil membawa isu ini ke tingkat internasional pada pertemuan Perserikatan bangsa-Bangsa 28 September 2013, Kalosil mengajukan pertanyaan, “*How can we ignore hundreds of thousands of West Papuans who have been brutally beaten and murdered?*” Kemudian dalam pidatonya di Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 4 Maret 2014, Carcasses kembali menyorotkan adanya pelanggaran HAM di Papua Barat dan meminta komite untuk mengadakan investigasi atas pelanggaran tersebut. Vanuatu juga menentang misi pencarian bukti oleh FMM karena Vanuatu meyakini bahwa telah mendapat pengaruh besar dari Pemerintah Indonesia dalam misi tersebut.

Victor Tutugoro, selaku juru Bicara *Front de Liberation National Kanak et Socialiste*, pada pertemuannya di tahun 2016 dengan Pator Alan Nafuki, pemimpin *Vanuatu Free West Papua Association*, menyatakan dukungan penuh pada pengajuan keanggotaan ULMWP di

Melanesian Spearhead Group. FLNKS sebelumnya pernah menolak keanggotaan WPNCL dan menyarankan adanya penggabungan gerakan-gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat untuk menaikkan posisi tawar menawar dalam pengajuan keanggotaan di *Melanesian Spearhead Group*.

Solomon Island melalui pemerintah merekomendasikan penunjukkan *Special Select Committee* untuk melaporkan posisi Kepulauan Solomon terkait Papua Barat pada tahun 2011. Selanjutnya pada kunjungan perwakilan WPNCL, Andi Ayamiseba, Dr. Otto Ondawame, dan Rex Rumakiek April 2013, Perdana Menteri Darcy Lilo menekankan akan mendukung saudara Melanesia di Papua barat untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Perubahan berawal dari kunjungan Perdana Menteri Lilo ke Jakarta pada Agustus 2013. Pada kunjungan itu, Pemerintah Kepulauan Solomon menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan Indonesia. Pada juli 2014, Kepulauan Solomon dan Indonesia kian meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan mendirikan kedutaan di wilayah kedua belah pihak. Kendati dukungan atas kemerdekaan papua barat darang dari akar rumput, Pemerintah Kepulauan Solomon tidak ingin merusak kedekatannya dengan Indonesia.

Stance ini kembali bergeser pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manasseh Sogavare. Beliau menyatakan dukungannya terhadap mosi yang akan diajukan Perdana Menteri Vanuatu pada *Melanesian Spearhead Group Leader Summit 2016* mengenai peningkatan keanggotaan ULMWP pada *Melanesian Spearhead Group*. Sogavare menganggap perlu mengembalikan keputusan kepada semua anggota *Melanesian Spearhead Group* karena Indonesia dianggap tidak menanggapi dengan baik usaha dialog dengan

Melanesian Spearhead Group dan ULMWP.³⁶ Menurut *press release* yang dikeluarkan oleh Sekretariat Perdana Menteri kepulauan Solomon, pemberian keanggotaan penuh ULMWP pada *Melanesian Spearhead Group* dapat dijustifikasi dengan pengajuan keanggotaan Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* hanya ingin melindungi kepentingan dan tidak serius mengadakan dialog terkait perlindungan hak asasi manusia di Papua Barat.³⁷

Berbeda dengan keadaan di Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan FLNKS, sebagai pusat Sekretariat *Pacific Island Forum*, Pemerintah Fiji tidak terlaku vokal dalam permasalahan Papua Barat. Fiji cenderung membangun kerjasama dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan Kedutaan Besar Fiji di Jakarta pada 2011. Kedekatan Fiji dengan Indonesia menjadi penting mengingat ketidakstabilan politik dan ekonomi Fiji pasca penangguhan keanggotaannya di PIF. Fiji menggantungkan perkembangan ekonominya melalui forum tandingan *Pacific Island Development Forum* (PIDF) yang diinisiasi olehnya pada tahun 2013. PIDF mendapat dukungan dana dari Cina, Rusia, Kwait, Uni Arab Emirat, dan Indonesia.

Hal ini tidak berarti Fiji menolak sepenuhnya kehadiran perwakilan Papua Barat di *Melanesian Spearhead Group*. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, yang kala itu menjabat sebagai

³⁶ Free West Papua Campaign, “*Solomon Island&Vanuatu Supporting West Papua for Full Membership of the Melanesian Spearhead Group*”, *Fre West Papua Campaign* (daring), 12 Mei 2016, <<https://www.freewestpapua.org/2016/05/12/solomon-islands-vanuatu-supporting-west-papua-for-full-membership-of-the-melanesian-spearhead-group-msg/>>, diakses 7 Oktober 2016

³⁷ Mambor, Victor, “*MSG Chair Said The MSG’s Principle is Decolonization of Melanesia*”, *Tabloid Jubi* (daring), 24 Mei 2016, <<http://tabloidjubi.com/eng/msg-chair-said-the-msgs-principle-is-decolonisation-of-melanesia/>>, diakses 20 September 2016

Kepala *Melanesian Spearhead Group* menyambut kedatangan wakil Ketua WPNCL, John Otto Ondawame, dengan antusias di Suva pada Maret 2013 untuk mengajukan keanggotaan pada *Melanesian Spearhead Group*. Perdana Menteri Kalosil dari Vanuatu dalam sebuah *press release* menyatakan, “*I told him on my intention to push for West Papua to gain full membership within the Melanesian Spearhead Group. He said he had nothing against it but cautioned that we should not overlook Indonesia as a vital trade and development partner, but to work closely with them.*”³⁸ Dari sini dapat dilihat bahwa Fiji memang tidak menentang ULMWP tetapi juga condong pada Indonesia. Wawancara dengan beberapa narasumber juga mengindikasikan bahwa Fiji berkomitmen untuk mendukung posisi Indonesia dengan berbagai hak yang dimilikinya dalam *Melanesian Spearhead Group*.

Di sisi lain, dukungan penuh datang dari pihak oposisi pemerintah dan organisasi akar rumput seperti *Fiji Women’s Crisis Center* (FWCC), *Methodist Church*, *The Pacific Conference of Church*, dan *Fiji Women’s Right Movement* (FWRM).³⁹ Pemimpin Oposisi Pemerintah Fiji tahun 2016, Ro Teimumu Kepa, mendeklarasikan dukungan penuhnya terhadap pengajuan keanggotaan tetap ULMWP di *Melanesian Spearhead Group*. Ro Teimumu menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam kawasan hanya untuk melindungi kepentingannya dan menunjukkan sikap tidak menghargai terhadap upaya genosida yang terjadi di Papua Barat.⁴⁰

³⁸ Tarere, W., “*Bainimarama has no problem with West Papua in MSG*”, Vanuatu Daily Post (daring), 10 Mei 2013, <<http://www.dailypost.vu/content/bainimarama-has-no-problem-west-papua-msg>>, diakses 30 Agustus 2016.

³⁹ Vuibau, T., “*Papua Plea*”, Fiji Times (daring), 27 Juni 2014, <<http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=272664>>, diakses 1 September 2016.

⁴⁰ Radio New Zealand, “*Strong Fiji Backing for West Papua-Ro Teimumu*” Radio New Zealand (daring), 13 Juli 2016, <<http://www.radionz.co.nz/international/pacific->

Nuansa condong pada Indonesia juga ditunjukkan oleh Pemerintahan Papua Nugini. Papua Nugini memilih untuk tidak mendukung Papua Barat. Konsistensi Papua Nugini untuk menghargai kedaulatan Indonesia merupakan keputusan yang menghendaki sikap yang sama dari pihak Indonesia. Hal ini menjadi penting terkait permasalahan gerakan separatism yang dihadapi Papua Nugini di wilayah Bougainville. Papua Nugini cenderung untuk melakukan kerjasama pengelolaan perbatasan dengan Indonesia. Selain itu, narasumber Tagoman memberi tambahan terkait posisi Papua Nugini bahwasannya negara ini tidak mempermasalahkan terkait status Papua Barat sebagai wilayah NKRI. Papua Nugini hanya sering menghimbau Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut.

Pada saat kepemimpinan Sir Michael Somare, Papua Nugini berjanji bahwa wilayahnya tidak akan menjadi basis pergerakan separatism anti Indonesia, mengontrol aktivitas politik dan izin tinggal, serta akan merepatriasi imigran illegal dan pemimpin gerakan separatisme.⁴¹ Perdana Menteri Somare saat berbincang dengan Presiden Megawati pada pertemuan APEC di Mexico tahun 2002 menyatakan, "...we don't promote, we don't support them, we know West Papua is still an integral part of Republic of Indonesia."⁴². Sangat disayangkan karena hal itu juga mengalami perubahan era kepemimpinan Perdana Menteri O'Neil. Sehari setelah pengajuan keanggotaan ULMWP di *Melanesian Spearhead Group*, 4 Februari

[news/308573/strong-fiji-backing-for-west-papua-ro-teimumu](https://www.reuters.com/news/308573/strong-fiji-backing-for-west-papua-ro-teimumu)>, diakses 30 Agustus 2016

⁴¹ Weatherbee, D., 'Papua New Guinea's Foreign Policy: a bridge to Indonesia shores', *Journal Contemporary Southeast Asia*, Vol. 4, No.3, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1982.

⁴² Wardhani, Baiq L.S.W., *Kajian Asia Pasifik*, Intrans Publishing, Malang, September 2015, hal. 192

2015, O'Neil dalam pidatonya menyampaikan, “*Sometimes we forget our own families, our own brothers, especially those in West Papua. I think as a country the time has come to speak for our people about the oppression there.*” Hal ini menunjukkan sebuah perubahan dan perbedaan *stance* Papua Nugini pada era kepemimpinan perdana menteri terdahulu. Alasan perubahan kebijakan ini dijelaskan oleh R.J May sebagai sebuah dilema akibat tiga hal. May menyampaikan bahwa posisi Papua Nugini terkait isu ini terhimpit oleh tiga hal yaitu komitmen dengan Indonesia untuk melawan peberontak Irian (Papua), meningkatnya kelompok dalam negeri yang mendukung dan bersimpati pada kemerdekaan Irian, serta ancaman militer dari pemimpin OPM.⁴³

D. Kepentingan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Sejak awal terlibat di dalam *Melanesian Spearhead Group* pada 2011, Indonesia, dengan kekayaan penyebaran budaya Melanesia di lima provinsi, yaitu: Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas ini dan warisan budayanya. Dengan adanya kesamaan sejarah dan budaya, masyarakat Melanesia di Indonesia yang tersebar di lima provinsi akan menjadi aset yang luar biasa dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara anggota lainnya. Kawasan Pasifik merupakan salah satu prioritas utama bagi Indonesia, dimana Indonesia ingin melanjutkan keterlibatan positif dengan membangun konektivitas yang kuat dengan sesama anggota *Melanesian Spearhead Group*.

⁴³ R.J May 1986 dalam Wardhani, Baiq L.S.W., *Kajian Asia Pasifik*, Intrans Publishing, Malang, September 2015, hal. 192

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group* mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan adanya kunjungan peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan yang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri anggota *Melanesian Spearhead Group* ke Jakarta, Jayapura dan Ambon pada tanggal 11-16 Januari 2014. Kunjungan ini menghasilkan komitmen penting Indonesia, Fiji, PNG, Solomon Islands dan FLNKS Kaledonia Baru untuk, antara lain, saling mendukung kedaulatan negara; meningkatkan kerja sama di berbagai area kepentingan bersama; serta meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat, akademisi, pemuda dan olahragawan.⁴⁴

Konsep dasar maritim Indonesia menekankan “konektivitas” sebagai salah satu pilar. Sebuah konektivitas yang lebih baik akan membuka peluang yang lebih luas bagi semua orang. Melalui keanggotaan Indonesia di *Melanesian Spearhead Group*, konektivitas antara masyarakat di negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group dan 11 juta orang Melanesia Indonesia akan ditingkatkan. Hal ini juga akan membuka akses yang lebih besar kepada “253 juta rakyat Indonesia” yang memiliki potensi sebagai mitra dan juga pasar. Indonesia berpeluang menjadi pintu gerbang untuk memasuki pasar ASEAN yang lebih besar, sebuah pasar yang kuat yang terdiri dari 600 juta penduduk, atau setara dengan 9% populasi dunia. Komitmen Indonesia untuk *Melanesian Spearhead Group* adalah nyata dan konkret dengan keinginan untuk mendukung sesama anggota

⁴⁴ *Diplomasi Indonesia 2014*. Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 161.

Melanesian Spearhead Group agar memiliki sebuah keterlibatan yang kuat dan luas dengan masyarakat internasional.⁴⁵

Sebagai salah satu tindak lanjut kesepakatan para menteri yang merupakan hasil kerja keras diplomasi Indonesia tersebut, untuk pertama kalinya festival kesenian dan kebudayaan *Melanesian Festival of Arts and Culture*, yang diadakan di Papua Nugini pada bulan Juni-Juli 2014, mengundang Indonesia yang mengikutsertakan sekitar 238 penari, seniman dan delegasi dari Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Delegasi yang dihantar oleh Gubernur Papua ini telah mendapatkan sambutan yang sangat positif dari berbagai pihak.⁴⁶

Sebagai negara yang berada di antara kawasan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik yang berpenduduk Melanesia, Indonesia perlu memanfaatkan lokasi strategis tersebut baik secara politik maupun ekonomi. Hal ini telah mulai dilakukan dengan membantu mengintegrasikan kawasan Pasifik dengan forum-forum kerja sama yang lebih luas, melalui inisiatif Pemerintah Indonesia mengundang Dirjen *Melanesian Spearhead Group* untuk hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri APEC di Bali dan dalam Bali Democracy Forum tahun 2013. Melanjutkan inisiatif tersebut, Dirjen *Melanesian Spearhead Group* telah kembali diundang dan menghadiri *United Nations Alliance of Civilizations* di Bali pada 29-30 Agustus 2014.⁴⁷

Salah satu faktor yang bisa menjadi pembenar (*justification*) keanggotaan penuh Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*

⁴⁵ *Memperkuat Kemitraan dengan The Melanesian Spearhead Group.*
<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/219-4-articles-juli-2015/1928-memperkuat-kemitraan-dengan-the-melanesian-spearhead-group.html>, diakses pada 16 Agustus 2016, pukul 11.30 WIB

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

adalah bahwa Indonesia memiliki komunitas Melanesia terbesar jika dibandingkan komunitas Melanesia di seluruh kawasan Pasifik, sehingga Indonesia memiliki kedekatan geografi, ras dan budaya sebagai sesama komunitas Melanesia sehingga sudah seharusnya Indonesia bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* sebagai anggota penuh.

Keanggotaan penuh Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* sangat penting karena dua alasan. Pertama, untuk menjaga dialog antara masyarakat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap konstruktif dan terarah pada persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai sila ke-3 Pancasila. Kedua, mengubah konsep *Melanesian Socialism and Solidarity* dalam *Melanesian Spearhead Group* terutama subkonsep dukungan pada kemerdekaan Papua Barat menjadi dukungan penuh pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Melanesian Spearhead Group menyebut Papua Barat untuk merujuk pada wilayah kepulauan Papua yang termasuk dalam wilayah Indonesia (yang saat ini terdiri dari provinsi Papua Barat dan provinsi Papua), sementara Papua Timur (East Papua) merujuk pada wilayah kepulauan Papua yang termasuk dalam wilayah Papua New Guinea.⁴⁸ Satu persoalan yang melibatkan solidaritas Melanesia yang terbukti sangat penuh dengan kesulitan adalah menyangkut persoalan Papua Barat dan integrasi ke dalam negara Indonesia. Ekspresi nasionalisme Papua Barat dan perjuangan kemerdekaan Papua Barat melawan

⁴⁸ *Pentingnya Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vanuatu*. <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-vanuatu> Diakses pada 9 Mei 2016, pukul 11.30 WIB

Indonesia diekspresikan dengan sangat kuat dalam istilah Melanesia. Oleh karena itu, tradisi-tradisi lokal di Papua Barat telah dimobilisasi dan diekspresikan di dalam bahasa kebudayaan Melanesia yang baru.